

**ANALISIS HUKUM ISLAM MENGENAI GOLONGAN PUTIH DALAM
PEMILIHAN DAERAH MENURUT PERSPEKTIF MAJELIS ULAMA
INDONESIA LAMPUNG**

Skripsi.

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam Ilmu Syariah**

Oleh :

ELLI SETIAWATI

NPM. 1521020208

Jurusan : SIYASAH SYAR'IIYAH



.

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1441H / 2019M**

ABSTRAK

Fenomena golput tidak dapat dipungkiri selalu ada pada setiap pemilihan umum baik pemilihan presiden, gubernur maupun legislatif. Golput pada awalnya merupakan gerakan moral yang diproklamlirkan pertama kali di Gedung Budaya Jakarta sebagai bentuk protes terhadap pemilihan umum yang diselenggarakan oleh negara pada waktu itu. Golput selalu eksis dalam setiap pemilihan umum, hal ini dikarenakan sistem demokrasi karena dalam sistem ini rakyat diberikan kebebasan untuk ikut serta dalam menentukan kebijakan kh ususnya dalam hal memilih kepala negara atau kepala pemerintahan. Memilih merupakan hak setiap warga negara yang telah dinyatakan dewasa oleh undang-undang untuk memberikan hak pilihnya dalam pemilihan umum yang diselenggarakan untuk memilih presiden, legislatif, gubernur dan bupati.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana pandangan MUI Lampung mengenai alasan golput dalam pilkada dan bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap golput dalam pilkada.

Penelitian ini menggunakan Metode Kualitatif dengan deskriptif analisis yang menggunakan pendekatan perilaku dengan tujuan untuk memperoleh data secara langsung dari partisipasi dan informasi dari objek yang diteliti, baik secara langsung maupun tidak langsung, teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dengan pihak terkait, dan dokumentasi. Pihak penelitian yang menjadi objek penelitian ini adalah MUI Provinsi Lampung.

Dalam Hukum Islam Golput itu tidak diperbolehkan atau bisa dikatakan haram karena jika sebuah negara tidak ada seorang pemimpin maka akan terjadi kekosongan dalam kepemimpinan dan negara akan menjadi sangat kacau. Jadi Sebagai warga negara wajib memilih dalam pemilihan umum, maka keberadaan seorang pemimpin itu sudah menjadi sebuah kebutuhan suatu negara. Upaya yang dilakukan oleh pihak MUI provinsi lampung agar tidak terjadi golput yaitu dengan cara memberikan suatu pemahaman bawasannya alam demokrasi ini memerlukan pemimpin dan pemimpin itu harus dipilih sesuai dengan hati nurani masing-masing agar dapat merubah negara dan berbangsa lebih baik lagi.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Elli Setiawati

NIM : 1521020208

Jurusan/Prodi : Siyasah

Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP KONSEP WAWASAN KEBANGSAAN MENURUT NAHDATUL ULAMA (NU) DAN MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) (Studi Analisis Terhadap Pendapat Pengurus Wilayah Nahdatul Ulama dan Majelis Ulama Indonesia Provinsi Lampung)”** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikat ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung,

Penulis

Elli setiawati

1521020208

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Leikol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131 Telp (0721) 703289

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **ANALISIS HUKUM ISLAM MENGENAI GOLONGAN
PUTIH DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH
MENURUT PERSPEKTIF MAJELIS ULAMA
INDONESIA LAMPUNG**
Nama : **Elli Setiawati**
NPM : **1521020208**
Jurusan : **Siyasah Syar'iyah (Hukum Tata Negara)**
Fakultas : **Syari'ah**

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang Munaqasyah
Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Bunyana Sholihin, M.Ag
NIP. 195707051989031001

Drs. H. Irwantoni, M.Hum
NIP. 196010211991031002

Mengetahui,
Ketua Jurusan Siyasah Syar'iyah

Dr.Hj. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.H
NIP. 197111061998032005



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Letkol. H. Endro Suratinin Sukarame Bandar Lampung 35131 Telp (0721) 703289

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“ANALISIS HUKUM ISLAM MENGENAI GOLONGAN RUTIH DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH MENURUT PERSPEKTIF MAJELIS ULAMA INDONESIA LAMPUNG”** disusun oleh **Elli Setiawati, NPM : 1521020208**, program studi **Siyasah Syar’iyyah (Hukum Tata Negara)**, telah diujikan dalam sidang Munaqosyah di Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung.

TIM DEWAN PENGUJI

Ketua Penguji : Dr. H. Jayusman, M.Ag

Sekretaris : Gatot Bintoro putra Aji, S.H., M.E.Sy.

Penguji Utama : Eti Karini, S.H., M.Hum.

Penguji Pendamping I : Dr. Bunyana Sholihin, M.Ag.

Penguji Pendamping II : Drs. H. Irwantoni, M.Hum.



**Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah**

Dr. H. Khairuddin, M.H
NIP. 196210221993031002

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُوْلَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي

شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ

وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٦﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya



PERSEMBAHAN

Dengan menyebut nama Allah SWT dan rasa syukur yang tak terhingga dan sebagai ungkapan terima kasih, ku persembahkan skripsi ini kepada:

1. Ayahanda tercinta, bapak Nyono dan Ibu tercinta Mijah, terimakasih atas setiap tetes keringat yang Bapak dan Ibu korbankan untukku, terima kasih atas setiap do'a yang selalu dipanjatkan untuk kelancaran dan kesuksesanku, terima kasih selalu memberiku semangat dan motivasi, terima kasih perjuangan kalian tanpa henti untuk memberikan segala kasih sayang kalian. Terimakasih banyak kalian orang tuaku yang terbaik dalam hidupku
2. Untuk kakak-kakakku dan yunda-yundaku, Budiono, Nuryati, Susilowati, Tri Wahyu N, dan Edi Sukamto, S.pd. yang selalu memberikan semangat dan dukungannya untukku dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Untuk sahabat-sahabat tercintaku, seperjuangan satu angkatan satu ruangan, Hukum Tata Negara 2015, Khusnul Zannah, Devi Apriani, Mery Kurniati, Irma Asmah Mawadati, Istikhorotus sholihah, yang selalu menyemangati dan memberikan solusi saat susah senang bersama, makan tidur main bersamaku.
4. Dan yang terakhir untuk almamater UIN Raden Intan Lampung tempatku menuntut ilmu.



Penulis dilahirkan di Fajar Baru, kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan, pada tanggal 15 januari 1997 sebagai anak ke-enam dari lima bersaudara yang dilahirkan dari pasangan Bapak Nyono dan Ibu Mijah.

Riwayat Pendidikan yang pernah ditempuh penulis adalah:

1. Penulis menempuh pendidikan SDN 2 Fajar Baru, kec. Jati Agung Lampung Selatan tahun 2004, serta tamat dan mendapatkan ijazah pada tahun 2009.
2. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Pertama pada SMP Al-Huda Lampung Selatan di tahun 2009 dan lulus serta mendapatkan ijazah sekolah Menengah Pertama pada tahun 2012.
3. Selanjutnya Penulis melanjutkan pendidikan sekolah menengah atas pada SMA Al-Huda Lampung Selatan di tahun 2012 dan lulus serta mendapatkan ijazah sekolah menengah atas pada tahun 2015.
4. Pada Tahun 2015 penulis melanjutkan Pendidikan pada Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung terdaftar sebagai Mahasiswa Fakultas Syari'ah Jurusan siyasah (Hukum Tata Negara).



Assalamualaikum wr. Wb

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayah-Nya, sehingga skripsi dengan judul **“ANALISIS HUKUM ISLAM MENGENAI GOLPUT DALAM PILKADA MENURUT PERSPEKTIF MAJELIS ULAMA INDONESIA LAMPUNG”** dapat terselesaikan. Shalawat serta salam penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW., keluarga, para Sahabat, dan para pengikutnya yang setia kepadanya hingga akhir zaman. Skripsi ini ditulis dan diselesaikan sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program Strata (S1) Jurusan Siyasah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S. H.) dalam bidang Ilmu syariah. Atas semua pihak dalam proses penyelesaian skripsi ini, tak lupa penulis haturkan terimakasih sebesar-besarnya. Secara rinci ungkapan terima kasih itu disampaikan kepada:

1. Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M.Ag, selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung yang selalu memotivasi mahasiswa untuk menjadi pribadi yang berkualitas menjunjung tinggi nilai-nilai islam dan Persatuan.
2. Dr. Khairudin Tahmid, selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

3. Hj. Nurnazli, S.H, S.Ag, selaku ketua dan sekretaris Jurusan Siyasah yang senantiasa sabar dalam memberi arahan serta selalu memotivasi dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Dr. Bunyana Sholihin, M.Ag Selaku pembimbing I yang telah memberikan perhatian, bimbingan, arahan, dan masukan yang berarti selama proses penulisan skripsi ini.
5. Drs. H. Irwantoni, M. HUM. Selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktu dalam membimbing penulis untuk penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang dengan penuh pengabdian telah memberikan Ilmu pengetahuan pada penulis selama di bangku kuliah.
7. Terimakasih untuk MUI lampung dan Para staf-stafnya yang telah memberikan bantuan dan memberikan izin untuk penelitian.
8. Sahabat-sahabat ku Siyasah C, meri, Irma, khusnul, isti, karisma, popi, inayah, ipeh, matang, fitri, reni, delva, ela, permata, adi, teguh, ari, riskur yang telah cukup sabar menemani dan menyemangati setiap waktunya.
9. Teman-teman KKN tercinta Febri Haryanto, Novita, Elina Wati, dan kelompok lainnya.
10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, namun telah memberikan Do'a, menyemangati dan membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

Wassalamualaikum wr.wb.

Bandar Lampung,
Penulis

Elli Setiawati



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
PERSETUJUAN.....	iv
PENGESAHAN.....	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul	2
C. Latar Belakang Masalah	3
D. Rumusan Masalah	9
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	10
F. Metode Penelitian	10

BAB II LANDASAN TEORI

A. Kajian Teori	16
1. Hukum Islam	16
a. Pengertian Hukum Islam	16
b. Fiqh Siyasah Dusturiyah	17
2. Hak Dan Kewajiban dalam Pilkada	20
a. Pengertian Hak dan Kewajiban	20
b. Pengertian Pilkada	22
c. Dasar Hukum Pilkada.....	24
d. Tujuan Pilkada.....	25
3. GOLPUT	29
a. Pengertian Golput	29
b. Sejarah Lahirnya Golput.....	33
c. Penanaman Kesadaran Golput.....	40
d. Bentuk Kesadaran Golput.....	41
B. Tinjauan Pustaka	43

BAB III LAPORAN PENELITIAN

A. Riwayat Organisasi.	45
1. Sejarah MUI Provinsi Lampung	45
2. Dasar Hukum Berdirinya MUI.....	50

B. Pemikiran MUI Lampung Tentang Golput...	54
--	----

BAB IV ANALISA DATA

A. Golput Dalam Pilkada Menurut Perspektif MUI Lampung	67
B. Analisis Hukum Islam Mengenai Golput Dalam Pilkada Perspektif MUI Lampung.....	70

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	78
B. Rekomendasi	79

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Guna untuk memperjelas persepsi pokok permasalahan, maka perlu penjelasan judul dengan makna atau definisi yang terkandung didalamnya. Judul karya ilmiah ini adalah “ANALISIS HUKUM ISLAM MENGENAI GOLONGAN PUTIH DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH MENURUT PERSPEKTIF MUI LAMPUNG”. Judul tersebut terdiri dari beberapa istilah sebagai berikut:

1. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu permasalahan (karangan, perbuatan) dan sebagainya guna untuk mengetahui yang sebenarnya (sebab musabab duduk perkaranya).¹
2. Hukum Islam adalah ungkapan bahasa hukum yang umumnya digunakan untuk menyatakan kelompok hukum yang tercakup dalam wilayah kajian hukum dalam Islam.²
3. Golput merupakan golongan putih fakta dalam setiap penyelenggaraan pemilu masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya, cenderung meningkat disetiap penyelenggaraan pemilu. Prilaku tidak menggunakan hak suara untuk memilih pemimpin yang dipercaya mampu merubah nasib rakyat Indonesia yang disebut golput.³

¹Sudarsono, *Kamus Hukum (Edisi Baru)*, (Jakarta : PT Asdi Mahasatya, 2007), h.32

²Bunyana Sholihin, *Kaidah Hukum Islam*, (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2016), h.9

³Asrorun Ni'am Sholeh, *Golput dalam Pemilihan Umum perspektif Islam*, (Jakarta : MUI, 2007), h.179

4. Pilkada merupakan rekrutmen politik yaitu penyeleksian rakyat terhadap tokoh-tokoh yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah baik gubernur/wakil gubernur maupun bupati/ wakil bupati atau walikota/wakil walikota.⁴
5. Perspektif adalah pengharapan, peninjauan, tinjauan, pandang luas.⁵
6. MUI adalah lembaga yang mewadahi para ulama zu'ama, dan cendekiawan Islam di Indonesia untuk membimbing, membina dan mengayomi kaum Muslimin di seluruh Indonesia.⁶

Berdasarkan penjelasan diatas, yang dimaksud dalam judul skripsi ini adalah: “Analisis Hukum Islam Mengenai Golput Dalam Pilkada Menurut Perspektif MUI Lampung”, untuk menganalisis golput menurut pandangan MUI Lampung.

B. Alasan Memilih Judul

Sebagai alasan yang mendorong memilih judul “Analisis Hukum Islam Mengenai Golput Menurut Perspektif Pemikiran MUI Lampung”, adalah sebagai berikut:

1. Alasan Objektif

Saat Pemilihan Presiden, Wakil Presiden, DPR (Dewan Perwakilan Rakyat), DPD (Dewan Perwakilan Daerah), dan lainnya untuk memilih seorang pemimpin yang baik bagi negara ini justru masyarakat enggan

⁴ Muchlisin Riadi, “Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA)” (On-line), tersedia di : <https://www.kajianpustaka.com> (6 Oktober 2018,14:20), dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

⁵ Lexy J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya Offset. 1998.

memilih karna para calon dalam pilkada tidak sesuai dengan kriteria yang diinginkan sehingga membuat masyarakat golput. Dalam hukum Islam dan menurut MUI Lampung bahwa golput itu tidak di bolehkan atau dapat dikatakan bahwa golput itu tidak dibolehkan atau dapat dikatakan haram apabila mempengaruhi orang lain tidak dalam memilih dalam pilkada maka akan terjadinya kekosongan sebuah negara tersebut. Permasalahan seperti ini yang membuat penulis untuk meneliti.⁷

2. Alasan Subjektif

Permasalahan tersebut sangat menarik untuk dikaji secara lebih terperinci, karena adanya relevansi permasalahan tersebut dengan disiplin ilmu yang dipelajari.

C. Latar Belakang Masalah

Negara Demokrasi ialah julukan yang sangat diidam-idamkan setiap orang sebagai masyarakat negara seluruh dunia. Dimana setiap lapisan masyarakat dapat bebas berbicara, bebas mengeluarkan pendapat, bebas mengkritik, bahkan mengawasi jalannya pemerintahan. Semua kebebasan didasari oleh visi dan misi sebuah negara yang mengharapkan kesejahteraan dan kemakmuran yang menyeluruh sehingga menciptakan atau merubah tatanan kehidupan menjadi lebih baik lagi. Semakin erat komitmen sebuah negara dalam hal demokrasi atas segala keputusan yang diambil untuk kemajuan negara, maka akan semakin dekat dengan pencapaian visi dan misi

⁷ Mariam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2013), h. 479.

negara. Sehingga menjadi negara yang maju dan dapat menjadi panutan untuk negara-negara berkembang akan terwujud.

Negara Indonesia menunjukkan sebuah negara yang sukses menuju demokrasi, sebagai contoh nyata diantaranya ialah pemilihan gubernur dan wakil gubernur secara langsung atau demokrasi, yang di beri kebebasan untuk memilih suatu keyakinan/agama setiap individu. Namun kenyataannya di indonesia pada saat pemerintah menyelenggarakan pemilihan kepala daerah dan wakil daerah masih memiliki kendala menuju negara demokrasi sebagaimana yang diharapkan. Salah satunya akan dikupas dalam pembahasan ini yaitu Golongan Putih (Golput).

Sebagaimana demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dapat disimpulkan, ketidak ikutsertanya masyarakat saat berjalannya pemerintahan akan berdampak buruk bagi sebuah negara. Maka diharapkan seluruh lapisan masyarakat dan khususnya pemerintah dapat mengambil langkah cepat, efektif, dan efisien dalam mengambil keputusan dan melakukan tindakan perubahan untuk kemajuan negara.

Dimana dalam hal memaknai berbagai sudut pandang yang berbeda dengan cermat, dapat membantu pemerintah dalam memperbaiki keadaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengabaikan dan atau pasif untuk partisipasi politik masyarakat.⁸

Golongan putih diakronimkan menjadi golput adalah sekelompok masyarakat yang lalai dan tidak bersedia memberikan hak pilihnya dalam

⁸Selvian Nuriah, "Golput" (*On-line*), tersedia di : blogspot.com (6 Oktober 2018, 15:10), dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

pemilihan dengan berbagai macam alasan, baik pemilu legislatif, pilkada, maupun pemilihan kepala desa. Golput disebut juga dengan abstain atau blanko pada event pemilihan terbatas pada suatu lembaga, organisasi atau perusahaan.

Salah satu upaya dalam membangun kesadaran politik yaitu dengan menjalin komunikasi yang baik, sejumlah program dan strategi yang dilakukan komisi pemilihan umum sangat diharapkan karena sebuah lembaga yang berwenang sekaligus yang berkewajiban untuk mensosialisasikan kebijakan-kebijakan pemilihan umum kepala daerah supaya memilih tidak gugup lagi akan pemilu bukan saja lantaran golput justru lebih menarik untuk dikaji adalah sikap ataupun reaksi para pemilih.

Sosialisasi politik merupakan konsep kunci dalam mempelajari sosiologi politik. Sosialisasi politik jika dikaji lebih dalam akan mencakup dengan konsep-konsep sosiologi politik yang lainnya yaitu partisipasi politik, rekrutmen politik, dan komunikasi politik. Dahulunya, konsep sosialisasi politik ini hanya mendapat perhatian dan para ilmuwan dari cabang sosiologi, psikologi, dan antropologi dan kurang begitu mendapat perhatian yang serius dari para ilmuwan ilmu politik. Namun, kemudian konsep sosialisasi politik mulai mendapat perhatian oleh ilmuwan politik yang dimulai dari karya *Herbert Hyman* yang berjudul *The Political Socialization* pada tahun 1959.

Pada hakikat sosialisasi politik merupakan proses individu dapat mengenali system politik yang meliputi sifat, persepsi, dan reaksi individu

terhadap fenomena-fenomena politik. Rush dan Althoff menerangkan bahwa “*Sosialisasi ditentukan oleh lingkungan sosial, ekonomi dan kebudayaan dimana individu berada; selain itu juga ditentukan oleh interaksi pengalaman-pengalaman serta kepribadiannya.*”⁹

Pada pemikiran politik sunni *fiqh siyasah* di kalangan pemikir sunni terdapat pandangan bahwa pembentukan negara merupakan kewajiban. Menurut al-marwardi, *imamah* (negara) dibentuk dalam rangka menggantikan posisi kenabian (*nubuwwah*) dalam rangka melindungi agama dan mengatur kehidupan dunia (*al-imamah maudha'atun li khilafat al-nubuwwah fi hirasat al-din wa siyasat al-dunya*). Dalam hukum pelebagaan *imamah* (kepemimpinan, negara), menurut Al-Mawardi, adalah fardhu kifayah berdasarkan ijma' ulama. Pandangan ini didasarkan pada realitas sejarah al-khulafa' *Al-Rasyidun* dan para khalifah sesudah mereka, baik bani umaiyah maupun bani abbas, yang merupakan kesatuan politik umat islam ketika itu.¹⁰

Pandangan Al-Mawardi ini juga sejalan dengan kaidah usul fiqh *ma' la' yatimmu al-wajib illa bihi fahuwa wajib* (suatu kewajiban tidak sempurna terpenuhi kecuali melalui sarana atau alat, maka sarana atau alat tersebut juga wajib dipenuhi). Artinya, menciptakan dan memelihara kemaslahatan adalah kewajiban umat Islam, sedangkan sarana atau alat untuk terciptanya kemaslahatan tersebut adalah negara, maka mendirikan negara juga wajib

⁹Elly M. Setiadi, Usman Kolip, *Pengantar Sosiologi Politik*, (Jakarta: Kencana, 2013), h.168

¹⁰Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), h. 122.

(*fardhu kifayah*). Hal ini juga sesuai dengan kaidah *amr bi syay' amr bi wasa'ilihi* (perintah untuk mengerjakan sesuatu berarti juga perintah untuk mengerjakan sesuatu berarti juga perintah untuk mengerjakan penghubung-penghubungnya).

Pendapat al-mawardi di atas juga sejalan dengan pemikiran al-Ghazali. Menurut al-Ghazali, manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup tanpa bantuan orang lain. Disinilah perlunya mereka hidup bermasyarakat namun demikian lanjut imam al-Ghazali, pembentukan negara bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan praktis duniawi, melainkan juga untuk persiapan bagi kehidupan akhirat kelak. Berdasarkan pandangan diatas al-Ghazali berpendapat bahwa kewajiban pembentukan negara dan pemilihan kepala negara bukanlah berdasarkan pertimbangan akal rasio, melainkan berdasarkan kewajiban agama (*syar'i*).

Hal ini dikarenakan bahwa kesejahteraan dan kebahagiaan akhirat tidak tercapai tanpa pengalaman dan penghayatan agama secara benar. Al-Ghazali menyatakan bahwa agama dan negara (pemimpin negara) bagaikan dua saudara yang kembar yang lahir dari rahim seorang ibu. Keduanya saling melengkapi. Dalam teorinya, al-Ghazali merumuskan bahwa agama adalah landasan atau baris bagi kehidupan manusia dan politik adalah penjaganya. Keduanya mempunyai hubungan erat. Politik tanpa agama bisa hancur, sebaliknya agama tanpa politik dapat hilang dalam kehidupan manusia.¹¹

¹¹*Ibid*, h. 122-123.

Kekuasaan politik atau penguasa merupakan penjaga bagi pelaksanaan agama. Pemikiran tersebut dapat dilacak akarnya dari pandangan beberapa ahli politik dan ketatanegaraan sunni mengenai sumber kekuasaan dan kewenangan penguasa. Kalangan sunni biasa menganggap bahawa kekuasaan kepala negara (khalifah) berasal dari tuhan. Dalam sejarah islam, yang pertama kali memperkenalkan dirinya sebagai khalifah (wakil) tuhan di bumi-nya adalah khalifah Abu Ja'far Al-Manshur dari bani abbas. Pernyataan ini menunjukkan bahwa khalifah memerintah berdasarkan mandat tuhan. Kekuasaannya adalah suci dan mutlak serta harus dipatuhi. Khalifah adalah bayang-bayang allah di dunia (*zhill allah fi al-ardh*).

Pandangan ini mendapat pembenaran dari Ibn Abi Rabi', pemikir sunni yang hidup pada abad ke-3 H/9 M. Di masa pemerintahan al-Mu'tashim, khalifah bani abbas kedelapan. Ibn abi rabi' mencari dasar bagi legitimasi keistimewaan hak-hak khalifah atas rakyatnya dalam ajaran agama, yaitu terdapat dalam surah Al-An'am, 6:165 dan An-Nisa, 4:59.

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ
لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٦٥﴾

*Artinya: Dan Dia lah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan Dia meninggikan sebahagian kamu atas sebahagian (yang lain) beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu Amat cepat siksaan-Nya dan Sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (Q.S Al-anam ayat:165).*¹²

¹² Departemen Agama Qur'an Surat Al-An'am 165 Yayasan Penyelenggara dan Penterjemah Al-Qur'an dan Terjemahnya, Depang RI, 2000

Selain ayat yang diatas terdapat ayat lainnya yaitu sebagai berikut:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۖ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ
ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.(Q.S. An-Nisa :4:59)¹³

Berdasarkan latar belakang tersebutlah, peneliti belum pernah menemukan adanya penelitian terhadap MUI Lampung tentang Golput dalam Pilkada, dan peneliti merasa tertarik untuk membahas lebih jauh Golput dalam Pilkada menurut Pemikiran MUI Lampung. Maka penyusunan skripsi ini diberi judul “ANALISIS HUKUM ISLAM MENGENAI GOLONGAN PUTIH DALAM PILKADA MENURUT PERSPEKTIFMUI LAMPUNG”.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pandangan MUI Provinsi Lampung mengenai alasan Golongan Putih Dalam Pilkada?
2. Bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap Golongan Putih dalam Pilkada?

¹³ QR. Surat An-Nisa; 4 : 59.

E. Tujuan dan Signifikasi Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk Mengetahui Bagaimana pandangan MUI Provinsi Lampung mengenai alasan golput Dalam Pilkada?
- b. Untuk Mengetahui Bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap Golput dalam Pilkada?

2. Signifikasi Penelitian

- a. Kegunaan secara teoritis sebagai sumbangan pengetahuan bagi pembaca khususnya yang terkait pembahasan dalam skripsi ini.
- b. Kegunaan praktis yaitu sebagai sumbang pemikiran terkait dengan pemikiran MUI Lampung tentang Golput dalam Pilkada yang telah sesuai atau tidak dengan Al-Qur'an dan As-sunnah.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan seperangkat pengetahuan tentang langkah-langkah sistematis dan logis tentang pencarian data yang berkenaan dengan masalah tertentu untuk diolah, dianalisis, diambil sebuah kesimpulan dan selanjutnya dicarikan cara penyelesaiannya.¹⁴

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Menurut jenis penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*). Jenis penelitian lapangan adalah penelitian yang bertujuan

¹⁴Wardi Bahtiar, *Metode Ilmu Dakwah*, (Jakarta ; Logos cet 1, 1997), h.1

untuk mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan.¹⁵ Yakni dari berbagai informasi yang berkaitan dan dari buku-buku yang membahas tentang Golput dalam Pilkada, termasuk juga data primer hasil *interview* penulis dengan para pihak yang bersangkutan sebagai objek penelitian. Jadi, untuk mendapatkan informasi tentang Golput dalam Pilkada menurut pandangan MUI Lampung, penulis melakukan wawancara dengan MUI Lampung secara bebas dan terpimpin. Bebas terpimpin yaitu wawancara yang dilakukan secara bebas namun masih dipimpin oleh kerangka pertanyaan.

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis mengenai subjek yang diteliti, penelitian yang bersifat deskriptif analisis.¹⁶ Deskriptif adalah metode yang bertumpu pada pencarian fakta-fakta dengan interpretasi yang tepat sehingga gambaran dan pembahasan menjadi jelas. Sedangkan analisis adalah cara untuk menguraikan dan menganalisis data dengan cermat, tepat dan terarah.¹⁷ Penulis akan menganalisis tentang Golput dalam Pilkada menurut perspektif MUI Lampung.

¹⁵ Susiadi, *Metode Penelitian* (Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015), h.10.

¹⁶ M. Nasir, *Metode Penelitian* (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1988), h.63

¹⁷ *Ibid*, h. 66

2. Data dan Sumber Data

- a. Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber asli lapangan atau lokasi penelitian yang memberikan informasi langsung pada penelitian. Dalam hal ini penulis akan mengumpulkan sumber data dari pemimpin dan seseorang yang juga mempunyai jabatan selain dari pemimpin.
- b. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari buku, jurnal, karya ilmiah yang dilakukan dengan cara membaca, menelaah, dan mencatat sebagai literatur atau bahan yang sesuai dengan pokok bahasan, kemudian disaring dan dituangkan dalam kerangka pemikiran teoritis. Penulis akan mengumpulkan literatur serta dokumen resmi yang berkaitan dengan golput dalam pilkada menurut perspektif MUI Provinsi Lampung.

3. Populasi dan Sampel

Populasi adalah himpunan keseluruhan karakteristik dan objek yang diteliti.¹⁸ Dalam penelitian ini populasi yang diambil adalah seluruh pegawai MUI provinsi Lampung, referensi atau wakil dari satu populasi yang cukup besar jumlahnya.¹⁹ Populasi keseluruhan yang ada di Majelis Ulama Indonesia yang mempunyai jabatan berjumlah 171 orang.

Sampel adalah bagian objek dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.²⁰ Peneliti mengambil Sampel dengan menggunakan

¹⁸ Sedermati, Syarifudin Hidayat, *Metode Penelitian* (Bandung : Mandar Maju, cet 1, 2002), h. 121

¹⁹ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Sosial* (Bandung : Mandar Maju, 1996), h. 148

²⁰ Soekidjo Noetoadmojo, 2003, *Metodologi Penelitian Kesehatan*, (Jakarta: Rineka Cipta)

teknik *Purposive Sampling* yaitu mengambil sampel yang ditujukan kepada responden yang dikehendaki dan dianggap mewakili serta memberikan keterangan yang mengarah sehingga memperoleh data yang factual. Sampel yang diambil peneliti berjumlah 4 orang yang terdiri dari Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI), Wakil ketua, Sekretaris. Dan komisi dakwah dan pengembangan masyarakat. Dengan penelitian ini penelitian harus punya latar belakang pengetahuan tertentu mengenai sampel dan dimaksud agar benar-benar bisa mendapatkan sampel yang sesuai dengan persyaratan atau tujuan penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan merupakan teknik yang paling penting dalam penelitian, karena tujuan penelitian adalah mengumpulkan data.²¹

a. Observasi

Metode observasi adalah metode pengumpulan data dengan cara melakukan pencatatan secara cermat dan sistematis.²²

b. Wawancara (*interview*)

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk mendapatkan penelitian dengan cara tanya jawab dengan bertatap muka antara penanya (pewawancara) dengan penjawab (responden) dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide*. Untuk mendapatkan informasi secara lengkap tentang Golput dalam Pilkada

²¹ Sugiono, *Metode Penelitian bisnis, cetakan ke 14* (Bandung: Alfabeta, 2009), h.402.

²² Soeratno, Lincolin Arsyad, *Metode Penelitian Untuk Ekonomi dan Bisnis* (Yogyakarta: STIM YKPN, 2008), h.70.

menurut perspektif Pemikiran MUI Lampung, penulis melakukan wawancara dengan pihak berikut ini: 1) Ketua Umum.²³

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data melalui buku-buku yang berkaitan dengan masalah penelitian.²⁴ Dokumentasi disini bermaksud menghimpun data berupa dokumen tentang situasi lapangan, selain itu metode dokumentasi yang dimaksud adalah suatu upaya untuk mengumpulkan bukti-bukti atau data-data yang berkaitan dengan permasalahan yang terjadi.

Dokumentasi merupakan salah satu cara pengumpulan data dengan mengumpulkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Golput dalam Pilkada menurut perspektif Pemikiran MUI Lampung, seperti data primer yaitu data-data yang berasal dari izin lapangan dan data-data sekunder diambil dari data-data pustaka dengan cara membaca referensi terkait.

5. Pengelolaan data

Pengelolaan data yaitu suatu proses dalam memperoleh data ringkasan dengan menggunakan cara-cara atau rumus-rumus tertentu, seperti:

- a. *Editing*, adalah pengecekan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan, karena kemungkinan data yang masuk (*row data*) atau terkumpul itu tidak logis dan meragukan. Tujuannya adalah untuk menghilangkan kesalahan-kesalahan yang terdapat pada pencatatan

²³ Suharsmi Arikunto, *Prosedur Penelitian Lapangan* (Jakarta : Rineka Cipta, 2002), h. 102

dilapangan dan bersifat koreksi, sehingga kekurangannya dapat dilengkapi atau diperbaiki.

- b. Koding, adalah mengklasifikasikan jawaban-jawaban dari pada responden ke dalam kategori-kategori. Biasanya klasifikasi dilakukan dengan cara memberikan kode/tanda berbentuk angka pada masing-masing jawaban. Dalam melakukan koding itu ada 2 langkah yang haru ditempuh, yaitu :

- 1) Menentukan kategori-kategori yng akan digunakan.
- 2) Mengalokasikan jawaban-jawaban respon-den pada kategori-kategori terebut.

6. Analisa Data

Data dianalisis secara kualitatif yaitu upaya-upaya sistematis dalam penelitian yang bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran yang lengkap, tentang keadaan hukum yang berlaku ditempat yang terjadi dalam masyarakat termasuk didalamnya adalah kaidah dan teknik untuk memuaskan keingintahuan penelitian pada suatu yuridis atau cara untuk mencari kebenaran dan memperoleh pengetahuan. Analisa data ini menggunakan instrument analisis deduktif.²⁵

²⁵ Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2010), h. 21

BAB II

LANDASAN TEORI

A. KAJIAN TEORI

1. Hukum Islam

a. Pengertian Hukum Islam

Hukum Islam merupakan rangkaian kata ‘hukum’ dan ‘Islam, secara terpisah hukum dapat diartikan sebagai seperangkat peraturan tentang tingkah laku manusia yang diakui sekelompok masyarakat, disusun oleh orang-orang yang diberi wewenang oleh masyarakat itu, berlaku dan mengikat seluruh anggotanya. Maka hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu allah dan sunah rasul tentang tingkah laku manusia mukalaf yang diakui dan diyakini mengikat untuk semua yang beragama Islam. Pengertian hukum islam menurut para ahli diungkapkan oleh Hasbi ash-Shiddieqy yang menyatakan bahwa hukum islam adalah koleksi usaha para ahli hukum islam dalam menerapkan syari’at atau hukum-hukum yang sesuai kebutuhan manusia. Hukum Islam menurut guru besar universitas Indonesia haliman ialah nama biasa yang diberi kepada dasar-dasar dan hukum-hukum yang diwahyukan oleh allah kepada nabi muhamad yang diwajibkan kepada umat Islam untuk minallah (untuk Allah) dan untuk manusia adalah syari’ah atau lengkapnya syari’ah Islamiyah yang dalam bahasa indonesia lazim disebut syari’ah Islam.²⁶

²⁶ Abdul Wahab Khallaf, “*Kaidah-kaidah Hukum Islam Ilmu Ushul Fiqh*”, h. 36.

2. Siyasah Dustruriyah

Siyasah *dustruriyah* adalah bagian fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam bagian ini dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara) , legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang) , lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Di samping itu, kajian ini juga membahas konsep negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi Pada bagian berikut:²⁷

a. Konstitusi

Dimana dalam fiqh siyasah, konstitusi disebut juga dengan *dusturi*. Yang berasal dari bahasa persia. Artinya adalah “seseorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama”. Dalam perkembangan selanjutnya, kata ini digunakan untuk menunjukan anggota kependetaan (pemuka agama) zoroaster (majusi). Menurut istilah, dustur berarti kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antra sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara, baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun tertulis (konstitusi). Kata dustur juga sudah diserap kedalam bahasa indonesia, yang salah satu artinya adalah undang-undang dasar suatu negara.

²⁷ Muhamad Iqbal, *Fiqh Siyasah*, (jakarta: Prenadamedia Group, h. 77-78)

b. Legislasi

Dalam kajian fiqh siyasah, legislasi atau kekuasaan legislasi disebut juga dengan *al-sulthah al-tasyri'iyah*, yaitu kekuasaan pemerintah islam dalam membuat dan menetapkan hukum. Menurut islam, tidak seorang pun berhak menetapkan hukum yang akan diberlakukan bagi umat islam. Hal ini ditegaskan sendiri oleh allah dalam surah *al-an'am*, 6:57 (*in al-hukm illa lillah*).²⁸

c. Ummah

Kata “ummah” (diindonesiakan menjadi umat) adalah sebuah konsep yang telah akrab dalam masyarakat kita, akan tetapi sering dipahami secara keliru, istilah ini, karena begitu dekatnya dalam kehidupan kita sehari-hari, tak jarang terabaikan dan tidak dianggap sebagai pengertian ilmiah. Padahal, tidak kurang orientalis W. Montgomery Watt dan Benard Lewis, membahas konsep ini secara serius dalam karangan mereka. Dalam terminologi islam, istilah “ummah” konsep yang unik dan tidak ada padanannya dalam bahasa-bahasa barat. Sedangkan dalam ensiklopedia indonesia “umat” mengandung empat macam pengertian, yaitu: (1) bangsa, rakyat, kaum yang hidup bersatu padu²⁹ atas dasar iman/sabda tuhan, (2) penganut suatu agama atau pengikut nabi, (3) khalayak ramai, dan (4) umum, seluruh, umat mausia.

²⁸ *Ibid*, h. 80.

²⁹ *Ibid*, h. 214.

d. Syura dan Demokrasi

Kata “*syura*” berasal dari *sya-wa-ra* yang secara etimologis berarti mengeluarkan madu dari sarang lebah. Sejalan dengan pengertian ini, kata syura atau dalam bahasa indonesia menjadi “musyawarah” mengandung makna segala sesuatu yang dapat diambil atau dikeluarkan dari yang lain (termasuk pendapat) untuk memperoleh kebaikan. Hal ini semakna dengan pengertian lebah yang mengeluarkan madu yang yang berguna bagi manusia. Keputusan yang diambil berdasarkan syura merupakan sesuatu yang baik dan berguna bagi kepentingan kehidupan manusia.

Al-Qur’an menggunakan kata syura dalam tiga ayat. Pertama, surat *al-baqarah*, 2: 233 yang membicarakan kesepakatan musyawarah yang harus ditempuh suami istri kalau mereka ingin menyapih anak sebelum umur dua tahun. Adapun ayat yang kedua dan ketiga, yaitu surat *ali-imran* 3: 159 dan *asy-syura*, 42: 38 berbicara lebih umum dalam konteks yang lebih luas. Seacara prinsip, konsep syura berasal dari langit yang diwahyukan allah kepada manusia melalui Nabi Muhamad SAW, Sedangkan demokrasi adalah konsep ciptaan manusia yang lahir dari barat. Dari segi aplikasinya, pelaksanaan demokrasi tidak terlepas dari budaya barat yang dalam beberapa sisi jelas-jelas berbeda dengan nilai-nilai ajaran islam. Menurut iqbal, dalam sejarah islam, demokrasi islam (*syura*) hanya berjalan pada masa sahabat dan ini

harus dihidupkan kembali dalam masyarakat modern, karena memuat prinsip-prinsip spiritual, yaitu:

- 1) Pemilihan adalah satu-satunya cara untuk mengekspresikan kehendak seluruh rakyat;
- 2) Secara *de facto*, kedaulatan politik berada ditangan rakyat;
- 3) Masyarakat muslim berdasarkan pada kesamaan mutlak seluruh anggotanya;
- 4) Kepala negara bukanlah iman tertunggi dalam islam dan bukan merupakan wakil tuhan. Ia mungkin saja berbuat salah dan harus tunduk pada hukum tuhan;
- 5) Meskipun kepala negara, ia dapat dituntut dimuka sidang pengadilan;
- 6) Kepala negara memang dapat mencalonkan penggantinya, tapi pencalonannya batal bila ditolak rakyat;
- 7) Rakyat berhak melakukan *impeachment* terhadap kepala negara kalau ia berlawanan dengan syari'at.

2. Hak dan Kewajiban dalam Pilkada

a. Pengertian Hak dan Kewajiban

Pada azasnya setiap warga negara berhak ikut serta dalam Pemilihan Umum. Hak warga negara untuk ikut serta dalam pemilihan umum disebut Hak Pilih, yang terdiri dari:

- a. Hak pilih aktif (hak memilih)
- b. Hak pilih pasif (hak dipilih)

Setiap warga negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah berumur tujuh belas tahun atau lebih atau sudah/ pernah kawin, mempunyai hak memilih. Seorang warga negara Indonesia yang telah mempunyai hak memilih, baru bisa menggunakan haknya, apabila telah terdaftar sebagai pemilih.³⁰ Seseorang yang telah mempunyai hak memilih, untuk dapat terdaftar sebagai pemilih, harus memenuhi persyaratan: a) tidak terganggu jiwa/ ingatannya; b) tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sebaliknya seorang warga negara Indonesia yang telah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), kemudian ternyata tidak lagi memenuhi persyaratan tersebut diatas, tidak dapat menggunakan hak memilihnya.

Masalah dan gejolak sering kali terjadi ditengah-tengah masyarakat. Halini disebabkan karena tidak akuratnya data pemilih. Ada warga masyarakat yang telah memenuhi persyaratan sebagai pemilih, ternyata tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), malah sebaliknya orang-orang yang sudah meninggal dunia namanya masih tercantum dalam DPT. Sebenarnya masalah inil ebih bersifat teknis dan administratif, tetapi oleh pihak-pihak yang merasa dirugikan, masalah ini dipolitisasi sehingga tidak jarang menimbulkan gejolak dan konflik.

Berdasarkan pengamatan, ketidak akuratan pemilih/ DPT ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain:

³⁰ RozaliAbdullah.*MewujudkanPemiluyangLebihBerkualitas(PemiluLegislatif)*, (Jakarta: PT. RajaGrafindoPersada,2009),h.168.

- a. Belum tertatanya dengan baik data kependudukan, yang mana hal ini merupakan wewenang dan tanggung jawab Pemerintah, dalam hal ini Departemen dalam Negeri beserta jajarannya.
- b. Pemutakhiran data/ verifikasi data pemilih tidak dilakukan oleh KPU beserta jajarannya dengan baik.
- c. Masyarakat, dalam hal ini calon pemilih, tidak berusaha secara aktif, agar mereka tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT).³¹

a. Pengertian Pilkada

Pemilu dapat dirumuskan sebagai mekanisme pendelegasian kedaulatan rakyat kepada peserta pemilu/ atau calon anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden, Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah untuk membuat dan melaksanakan keputusan politik sesuai dengan kehendak rakyat. Pemilu juga berarti mekanisme perubahan politik mengenai pola dan arah kebijakan publik, dan atau mengenai sirkulasi elite, yang dilakukan secara periodik dan tertib.³²

Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, atau sering kali disebut Pilkada atau Pemilu ada, adalah bagian dari implementasi demokrasi. Kepala Daerah adalah jabatan politik yang bertugas memimpin dan menggerakkan lajunya roda pemerintahan. Terminologi jabatan publik artinya kepala daerah menjalankan fungsi pengambilan keputusan langsung dengan kepentingan rakyat atau publik,

³¹ *Ibid*, h.168.

³² Ramlan Surbakti, *Sistem Pemilu dan Tatahan Politik Demokrasi*, dalam Ramlan Surbakti, dkk(Ed.), *Perekayasa Sistem Pemilu untuk Pembangunan Tata Politik Demokratis*, (Jakarta: Kemitraan Jakarta, 2008), h 27.

berdampak kepada rakyat dan dirasakan. Oleh Karena itu Kepala Daerah harus dipilih oleh rakyat dan wajib mempertanggungjawabkannya. Sedangkan makna jabatan politik adalah bahwa mekanisme rekrutmen kepala daerah dilakukan secara politik yaitu melalui pemilihan yang melibatkan elemen-elemen politik yaitu dengan menyeleksi rakyat terhadap tokoh yang mencalonkan sebagai kepala daerah. Dalam kehidupan politik di daerah, pilkada merupakan kegiatan yang nilainya sejajar dengan pemilihan legislative, terbukti kepala daerah dan DPRD menjadi mitra.³³

Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau Wali kota dan Wakil Wali kota Tahun 2017 menjelaskan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau Wali kota dan Wakil Wali kota, selanjutnya disebut Pemilihan, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/ kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau Wali kota dan Wakil Wali kota secara langsung dan demokratis.³⁴

³³ Agus Hadiawan, *Evaluasi Pemilihan Kepala Daerah Langsung di Provinsi Lampung (Studi di Kabupaten Lampung Selatan, Kota Metro dan Kota Bandar Lampung)*, Bandar Lampung, Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pembangunan Universitas Lampung, Vol3, No7 Juli-Desember 2009, h637

³⁴ Budiardjo, Mariam. "Demokrasi di Pakistan", *Kompas*, 11 dan 12 Agustus 1996

b. Dasar Hukum Pilkada

Undang Undang Dasar 1945 merupakan suatu perangkat peraturan yang menentukan kekuasaan dan tanggung jawab dari berbagai alat kenegaraan, UndangUndang Dasar 1945 juga menentukan batas batas berbagai pusat kekuasaan itu dan memaparkan hubungan-hubungan diantara mereka.³⁵ Materi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berada dibawah Undang-Undang Dasar 1945 tidak diperbolehkan bertentangan dengan materi Undang-Undang Dasar 1945. Materi-materi tentang penyelenggaraan pemerintahan, pemilihan umum maupun tentang penyelenggara pemilihan umum yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 harus diterjemahkan kembali dalam Undang-Undang (UU), Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu), dan sebagainya. Pasal pasal yang terdapat didalam Undang-Undang Dasar 1945 harus dijadikan rujukan utama dalam pembuatan Undang-undang (UU), Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) dan sebagainya dan yang menjadi Dasar Hukum Pemilihan Kepala Daerah adalah:

- a. Undang-Undang Das
- b. ar 1945
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- d. Undang-Undang No 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas

³⁵Budiardjo Mariam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta Prima Grafika, 2013), h. 169

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali kota Menjadi Undang-Undang

- e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali kota dan Wakil Wali kota Tahun 2017
- f. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.³⁶

c. Tujuan Pilkada

Pemerintahan di daerah merupakan bagian dari penyelenggaraan pemerintah pusat sebagai konsekuensi Indonesia memakai sistem pemerintahan presidensiil. Presiden sebagai penyelenggara pemerintahan tertinggi dalam Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 mempunyai kewajiban untuk melaksanakan kewajiban pemerintahan untuk menuju tujuan negara Indonesia yang termaktub dalam pembukaan UUD 1945 alinea IV. Karena tugas dan kewajiban presiden sangat banyak, maka memerlukan bantuan dari pemerintah daerah, sebagai konsekuensi bentuk negara kesatuan

³⁶ Al Rasjid, Harun. *Beberapa Pandangan Mengenai Undang-Undang Pemilihan Umum* 1969. Jakarta: Pelita Ilmu, 1970.

adanya pembagian wilayah Republik Indonesia menjadi daerah besar (propinsi) dan daerah kecil (kabupaten/kota) seperti dalam pasal 18 UUD 1945.³⁷ Dalam konteks Pilkada, Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung oleh masyarakat memiliki legitimasi yang lebih besar dibandingkan dengan pemilihan oleh DPRD. Pilkada langsung dianggap sebagai kelanjutan cita-cita reformasi yang ingin mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat, sebab mandat yang diberikan langsung dianggap sebagai hak warga negara yang dijamin konstitusi.³⁸

Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang diselenggarakan saat ini dimaksudkan untuk memperkuat otonomi daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam pelaksanaannya, harus tetap berpedoman pada prinsip-prinsip pemberian otonomi daerah yang diatur didalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tersebut yakni :

- a. Penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan memperhatikan aspek demokrasi, keadilan, pemetaan serta potensi dan keanekaragaman daerah
- b. Pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan peranandan fungsi badan legislatif daerah, baik sebagai fungsi legislatif, fungsi pengawas maupun fungsi anggaran atas penyelenggaraan Pemerintah daerah
- c. Pelaksanaan otonomi daerah harus sesuai dengan konstitusi negara

³⁷ Septi Nur Wijayanti-IwanSatriawan, *Hukum Tata Negara*, (Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2013),h.157

³⁸ TjahjoKumolo, *Politik Hukum Pilkada Serentak*, (Jakarta: Expose,2015), h.16

sehingga tetap terjamin hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar-daerah³⁹

Adalima pertimbangan penting penyelenggaraan pilkada langsung bagi perkembangan Demokrasi diIndonesia :

- a. Pilkada langsung merupakan jawaban atas tuntutan aspirasi rakyat karena pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, DPR, DPD, DPRD selama ini telah dilakukan secara langsung.
- b. Pilkada langsung merupakan perwujudan konstitusi dan Undang-Undang dasar 1945, Gubernur, Bupati dan Wali Kota, masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota dipilih secara demokratis.
- c. Pemilihan Kepala Daerah Langsung sebagai sarana pembelajaran demokrasi (politik) bagi rakyat. Pilkada menjadi media pembelajaran praktik berdemokrasi bagi rakyat yang diharapkan dapat membentuk kesadaran kolektif segenapurn surbangsa tentang pentingnya memilih pemimpin yang benar sesuai hati nurainya.
- d. Pilkada langsung sebagai sarana untuk memperkuat otonomi daerah. Keberhasilan otonomi daerah salah satunya juga ditentukan oleh pemimpin lokal. Semakin baik pemimpin lokal yang dihasilkan dalam pilkada langsung 2017, maka komitmen pemimpin lokal dalam mewujudkan tujuan otonomi daerah, antara lain untuk meningkatkan

³⁹*Ibid*,h180

kesejahteraan masyarakat dengan selalum emperhatikan kepentingan dan aspirasi masyarakat agar dapat diwujudkan.

- e. Pilkada langsung merupakan sarana penting bagi proses kaderisasi kepemimpinan nasional. Disadari atautidak, stock kepemimpinan nasional amat terbatas.⁴⁰

Pendorong munculnya pilkada langsung antarlain :

- a. Sistem perwakilan (Lewat DPRD) diwarnai banyak kasus. Setidaknya ada tiga kasus yang terjadi, yakni :
 - 1). Proses pemilihan dan pelantikan diwarnai dugaan kasus politik uang dan intervensi pengurus partai politik dilevel lokal maupun pusat
 - 2). Untuk meloloskan LPJ tahunan sering menggunakan politik uang
 - 3). Kasus pemecatan atau pemberhentian kepala daerah akibat kepentingan DPRD tidak diakomodasi
- b. Rakyat dapat berperan langsung. Pilkada langsung sering disebut sebagai kemenangan demokrasi rakyat atas demokrasi perwakilan. Dalam sistem demokrasi, rakyat adalah pemilik kedaulatan sejati sehingga wajar apabila kepercayaan yang diberikan kepada wakil rakyat tidak dapat dipertanggung jawabkan dengan baik, maka kepercayaan tersebut dikembalikan kepada pemiliknya sendiri. Dengan demikian manipulasi dan intervensi berlebihan gaya politik lokal dapat dihindarkan. Negara berkewajiban memfasilitasi rakyat untuk mewujudkan kedaulatan tersebut.

⁴⁰Irham Fauzi, *Permasalahan Yang Timbul pada Pilkada*, (Yogyakarta: Paperpresentat Jurusan Teknik Informatika STIMIK Amikom Yogyakarta, 2011), h.2

- c. Peluang terjadinya politik uang akan makin tipis. Politik uang merupakan fenomena yang tak terhindari dalam pilkada dengan sistem perwakilan.¹³

1. Golput

a. Pengertian Golput

Konsep perilaku pemilih merupakan tindakan pemilih terkait pemilihan langsung, tetapi ada sebuah pandangan lainnya berseberangan dan bertolak belakang dengan konsep perilaku pemilih. Konsep tersebut adalah perilaku tidak memilih atau yang lebih dikenal dengan sebutan golongan putih (golput). Golput sesungguhnya merupakan fenomena politik dalam sebuah negara demokrasi. Pelaku golput memiliki tujuan mendelegitimasi pemilu yang diselenggarakan pemerintah. Sisi lain yang membuktikannya adalah pemerintah yang telah memberikan ruang aspirasi bagi kepentingan kelompok ekstra parlementer. Kenyataan itu menyebabkan golput sering disebut juga sebagai barometer kualitas demokrasi.⁴¹

Golput adalah mereka yang dengan sengaja dan dengan suatu maksud dan tujuan yang jelas menolak memberikan suara dalam pemilu.⁴² Beberapa ahli berpandangan bahwa warga yang berhalangan hadir ditempat pemilihan suara (TPS) karena alasan teknis, seperti jauhnya TPS atau luput dari pendaftaran, otomatis tidak termasuk kategori golput.

⁴¹ Isjwara, F. *Pengantar Ilmu Politik*. Bandung: Dhiwantara. 1964

⁴² Prihatmoko Joko, *Pemilihan Kepala Daerah Langsung*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), h. 150.

Pandangan tersebut diperkuat dengan pandangan yang dikemukakan oleh Muhammad Asfar dalam Efriza yang mengatakan bahwa: “Batasan perilaku *nonvoting* tidak berlaku bagi para pemilih yang tidak memilih karena faktor kelalaian atau situasi-situasi yang tidak bisa dikontrol oleh pemilih, seperti karena sakit atau kondisi cuaca termasuk sedang berada di suatu wilayah tertentu seperti tempat terpencil atau ditengah hutan yang tidak memungkinkan untuk memilih. Dalam konteks semacam ini, *nonvoting* adalah suatu sikap politik yang tidak menggunakan hak pilih pada saat hari H Pemilu karena faktor tidak adanya motivasi.”⁴³

Pandangan lain seperti yang dikemukakan Pahmi mengatakan golput sebagai kelompok orang yang tidak menggunakan hak pilihnya dalam suatu pemilihan. Sejak awal ada sekelompok orang yang tidak mau didaftarkan sebagai pemilih sehingga tahapan pemilu tidak diikutinya. Selain itu ada juga sekelompok orang yang terdaftar sebagai pemilih, tetapi tidak menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara.⁴⁴

Golput secara tidak langsung berhubungan dengan perasaan terkait dengan rasa kepuasan atau ketidak puasan dari masyarakat itu sendiri sebagai pemilih. Ketidak hadiran dalam golput juga dapat dikaitkan dengan perhitungan untung dan rugi seseorang sebagai pemilih. Pernyataan ini diperkuat dengan pendapat Susan WelchEfriza yang menyatakan sebagai berikut: “Ketidakhadiran seseorang dalam pemilu

⁴³PahmiSy, *Politik Pencitraan*, (Jakarta:GaungPersadaPress, 2010), h. 65

⁴⁴Susan Welch dalam Efriza, *Political Marketing "Strategi Memenangkan Pemilu Sebuah Pendekatan Baru Kampanye Pemilihan Umum DPR, DPD Presiden"*.(Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012), h. 534.

berkaitan dengan kepuasan atau ketidakpuasan pemilih. Kalau seseorang memperoleh kepuasan dengan tidak menghadiri pemilu tentu ia akan tidak hadir ke bilik suara, begitu pula sebaliknya. Disamping itu, ketidakhadiran juga berkaitan dengan kalkulasi untung rugi. Kalau seseorang merasa lebih beruntung secara finansial dengan tidak hadir dalam pemilu, tentu ia akan lebih suka melakukan pekerjaan lain yang lebih menguntungkan.”⁴⁵

Ketidakpuasan juga dapat dikaitkan sebagai bentuk protes terhadap sesuatu yang telah terjadi. Protes tersebut tentunya berkaitan dengan hal politik. Arbi Sanit menilai bahwa golput adalah gerakan protes politik yang didasarkan pada segenap problem kebangsaan. Sasaran protes masyarakat golput adalah pemilu dan tujuannya mewujudkan demokrasi dalam kehidupan masyarakat dan kenegaraan sebagai dari cita-cita kemerdekaan.⁴⁶

Golput juga merupakan bentuk ketidakpuasan masyarakat terhadap objek politik, hal ini seperti yang dikemukakan Arief Budimandalam Joko Prihatmoko yang mengatakan bahwa: “golput bukan organisasi, tanpa pengurus, dan hanya merupakan pertemuan solidaritas. Golput adalah sebuah identifikasi bagi mereka yang tidak puas dengan keadaan dan aturan main demokrasi yang diinjak-injak oleh partai politik dan pemerintah demi memenangkan pemilu dengan menggunakan aparat

⁴⁵ Arbi Sanit, *Sistem Politik Indonesia, Kestabilan dan Peta Kekuatan Politik*, (Jakarta: Grasindo, 1992), h.190.

⁴⁶ Arief Budimandalam Joko Prihatmoko, *Pemilihan Kepala Daerah Langsung*, (Jogjakarta: Pustaka Pelajar, 2003), h. 150,

negara melalui cara diluar batas aturan main demokratis. Keberadaan golput mengindikasikan bahwa proses politik yang sedang berlangsung tidak benar. Kendati tidak memiliki kekuatan politik, golput melakukan gerakannya dengan diam.⁴⁷

Arief Budiman secara tidak langsung mengatakan golput itu adalah hal yang dilakukan seseorang dengan sengaja datang ke TPS dan membuat pilihannya tidak sah dengan merusak atau mencoblos diluar ketentuan yang ada. Dia juga menghubungkan golput dengan orang yang tidak percaya dengan hasil pemilu dan tidak mau berpartisipasi. Orang tersebut bisa tidak datang ke TPS atau juga bisa datang ke TPS, tetapi membuat suaranya tidak sah.⁴⁸

Perilaku tidak memilih atau lebih dikenal dengan golput merupakan bentuk pemikiran yang terbentuk dari pribadi masing-masing yang terbentuk sendiri maupun terbentuk dari pengaruh lingkungan/orang lain. Berdasarkan penjelasan dan pendapat mengenai golput dari para ahli diatas, golput dapat diartikan sebagai suatu gerakan sekelompok orang (masyarakat) atau individu yang tidak menggunakan hak pilihnya. Sekelompok orang atau individu tersebut memiliki alasan yang sengaja untuk tidak memilih serta memiliki tujuan yang jelas mengenai hal yang dilakukannya tersebut dan juga dengan dampak atau akibat yang akan terjadi nantinya. Golput juga sebagai wujud protes politik dikarenakan adanya perasaan yang tidak puas dalam kehidupan masyarakat yang

⁴⁷ *Ibid.*

⁴⁸ Arbi Sanit, *Sistem Politik Indonesia, Kestabilan dan Peta Kekuatan Politik*, (Jakarta: Grasindo, 1992), h.190.

disebabkan oleh sistem dan objek politik yang adadi sekitarnya.⁴⁹

b. Sejarah Lahirnya Golput

Pemikiran golput memang muncul dari kalangan yang berpendidikan. Memasuki erareformasi diIndonesia, masyarakat cenderung memiliki pemikiran yang relatif lebih maju dan kritis. Pemikiran itu tidak terbatas pada latar belakang pendidikan yang tinggi, tetapi masyarakat yang berpendidikan rendah pun telah memiliki pemikiran yang berasal dari penilaian pribadi. Penilaian tersebut merupakan alasan yang menyebabkan mereka untuk menjadi golput dalam suatu pemilihan langsung.

Berbagai alasan yang melatar belakangi golput dapat dijelaskan lebih singkat dan jelas di bawah ini:

- a. Adanya kejenuhan politik, dengan banyak pemilihan umum mulai dari pemilu legislatif, pemilihan presiden, pemilihan kepala daerah gubernur, bupati, hingga pemilihan kepala desa yang berujung pada kejenuhan politik.
- b. Tidak adanya harapan yang lebih pasti dan kongkrit dari pemilihan umum tersebut. Pemilu tidak membawa perubahan bagi kehidupan masyarakat baik dari segi ekonomi maupun sosal dan budaya.
- c. Hilangnya kepercayaan masyarakat kepadapolitisi, janji-janji politik yang dilakukan politisi ternyata tidak terbukti.

⁴⁹ Friedrich, Carl J. *Constitutional Government and Democracy: Theory and Practice in europa and America*. Waltham, Mass: Blaisdell Publishing Company, 1967.

- d. Kebutaan politik, kurangnya pengetahuan pemilih terhadap sistem pemilihan umum dan perubahan-perubahan terkait dengan pemilu tersebut.
- e. Sistem politik yang ruwet, dengan tidak sederhananya sistem politik menyebabkan masyarakat pemilih enggan untuk menggunakan hak pilihnya.
- f. Hilangnya kepercayaan terhadap panitia penyelenggara pemilu seperti KPU dan Panwaslu.
- g. Adanya indikasi keterlibatan dan keberpihakkan pemerintah, PNS, POLRI, dan TNI dalam proses pemilu.⁵⁰

Golput yang identik dengan ketidakhadiran dapat dikaitkan dengan perasaan yang timbul akibat ketidakpercayaan dan ketidaksukaan masyarakat terhadap sistem politik, rezim yang berkuasa, partai politik, dan kandidat.⁵¹ Bentuk ketidak sukaan dan ketidak percayaannya tersebut seperti yang dikemukakan Muhammad Asfar berikut ini:

- a. Ketidak hadirannya diinterpretasikan kepada sistem politik, berbeda dengan kehadiran yang sering diinterpretasikan sebagai bentuk “loyalitas” atau kepercayaan pada sistem politik yang ada.
- b. Ketidak hadirannya pemilih dianggap sebagai reaksi/ekspresi dari ketidak sukaan masyarakat terhadap rezim yang berkuasa. Asumsi tersebut menyiratkan kondisi bahwa ketidak hadirannya pemilih

⁵⁰ Utrecht, E. *Pengantar dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Ichtiar, 1966.

⁵¹ Susan Welch dalam Efriza, *Political Marketing "Strategi Memenangkan Pemilu Sebuah Pendekatan Baru Kampanye Pemilihan Umum DPR, DPD Presiden"*. (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012), h. 534.

dimaknakan sebagai indikator lemahnya legitimasi rezim yang berkuasa.

- c. Ketidakpercayaan anggota masyarakat terhadap parpol dan kandidat.⁵²

Sebagaimana yang terjadi, mereka yang memilih golput umumnya di latar belakang oleh pendidikan yang rendah, tinggal dipedesaan, dan juga butaakan hal politik, akan tetapi hal itu tidak menutup kemungkinan bagi mereka yang berpendidikan tinggi, tinggal di perkotaan, dan memiliki kesadaran politik yang baik. Seiring perkembangan zaman dan wawasan mengenai kehidupan politik saat ini, pendukung golput tidak terbatas dari karakteristik tingkat pendidikan semata, tetapi juga dari tingkat pekerjaan, dan tingkat ekonomi. Tingkat pendidikan, pekerjaan, dan ekonomi merupakan hal yang berkaitan dengan latar belakang sosial ekonomi. Faktor latar belakang sosial ekonomi hanya salah satu yang menjadi penyebab golput.

Berdasarkan hasil tulisan Muhammad Asfar dalam “Presiden Golput”, Efriza setidaknya menyimpulkan ada empat faktor yang menjadi penyebab golput, yaitu:

- a. Faktor Psikologis

Faktor ini berkaitan dengan ciri-ciri kepribadian seseorang dan orientasi kepribadian. Perilaku golput berkaitan dengan kepribadian seseorang melihat bahwa kepribadian yang tidak toleran, otoriter, tak acuh, perasaan tidak aman, perasaan khawatir, kurang mempunyai

⁵² Hie, Norman H. 2002. *Partisipasi Politik*. Jakarta: Gramedia.

tanggung jawab secara pribadi, dan semacamnya. Orientasi kepribadian melihat dari rendahnya sosialisasi politik, tidak merasakan kepuasan dari aktivitas politik, merasakan aktivitas politik tidak memengaruhi peristiwa maupun kebijaksanaan politik, menganggap dirinya tidak terlibat urusan politik, dan pemerintah tidak berpengaruh terhadap hidupnya.

b. Faktor Sistem Politik

Faktor ini berkaitan dengan sistem politik khususnya sistem pemilu secara langsung. Pemilih melakukan protes terhadap sistem politik dan sistem pemilu terutama kecewa dengan kebijakan dan implementasi dari pemerintah. Sistem politik yang dibangun rezim berkuasa saat ini dirasakan pemilih tidak mampu membangun demokrasi yang sehat. Sistem pemilu proporsional juga dinilai tidak membawa perubahan politik dan tidak menjamin kedekatan antara wakil dan terwakili.

c. Faktor Kepercayaan Politik

Faktor ini sebagai bentuk perilaku golput sebagai ekspresi atas kepercayaan yang rendah terhadap sistem politik atau sebagai suatu ekspresi atas perasaan keterasingan (alienasi). Fenomena faktor kepercayaan politik ini biasanya muncul karena ketidakpercayaan terhadap saluran politik dalam bentuk partai dan akhirnya adanya keinginan warga negara untuk melakukan legitimasi politik terhadap kekuasaan.

d. Faktor Latar belakang Status Sosial-Ekonomi

Faktor ini terbagi lagi kedalam tiga indikator, yaitu tingkat pendidikan, tingkat pekerjaan, dan tingkat pendapatan. Raymond E. Wolfinger dan Steven J. Rosenstone menjelaskan bahwa:

- 1). Tingkat pendidikan tinggi menciptakan kemampuan lebih besar untuk mempelajari kehidupan politik tanpa rasa takut, sedangkan yang kurang berpendidikan berpengaruh untuk menghindari politik karena kekurangan mereka terhadap kepentingan dalam proses politik. Penelitian Raymond E. Wolfinger dan Steven J. Rosenstone menunjukkan hubungan antar tingkat pendidikan dengan tingkat ketidak hadirannya selalu menunjukkan arah berlawanan. Pemilih yang tingkat pendidikannya rendah cenderung menunjukkan angka ketidak hadirannya dalam pemilu cukup tinggi.
- 2). Tingkat pekerjaan tertentu lebih menghargai partisipasi warga. Para pemilih yang bekerja dilembaga berkaitan langsung dengan pemerintah cenderung lebih tinggi tingkat kehadirannya dalam pemilu dibandingkan para pemilih yang bekerja pada lembaga yang tidak mempunyai kaitan langsung dengan kebijakan pemerintah.
- 3). Tingkat pendapatan tinggi memudahkan orang menanggung beban finansial akibat keterlibatannya dalam proses pemilu. Menurut Raymond E. Wolfinger dan Steven J. Rosenstone, para

pemilih yang tingkat pendapatannya rendah cenderung menunjukkan angka ketidakhadiran cukup tinggi dan sebaliknya.⁵³

Berdasarkan pemaparan mengenai faktor-faktor penyebab golput diatas khususnya mengenai pendapat Raymond E. Wolfinger dan Steven J. Rosenstone, penelitian ini memakai empat faktor, yaitu faktor psikologis, faktor sistem politik, faktor kepercayaan politik, dan faktor latar belakang status sosial-ekonomi.⁵⁴

Faktor psikologis untuk mengetahui penyebab golput yang dilihat dari kepribadian seseorang dan orientasi kepribadian. Kepribadian seseorang ini melihat bahwa kepribadian yang tidak toleran, takacuh, kurang mempunyai tanggung jawab secara pribadi, dan sebagainya. Apabila dijelaskan lebih spesifik, kepribadian seseorang ini berkaitan dengan diri pribadi pemilih yang terlihat kurang bertanggung jawab, tidak acuh, dan tidak toleran seperti tidak memilih karena sakit /lelah /malas, adanya keluarga yang sakit/wafat, keengganan ke TPS karena hujan dan letaknya jauh dari rumah, dan lain-lain. Orientasi kepribadian melihat dari rendahnya sosialisasi politik, tidak merasakan kepuasan dari aktivitas politik, merasakan aktivitas politik tidak memengaruhi peristiwa maupun kebijaksanaan politik, menganggap dirinya tidak terlibat urusan

⁵³ Sanit, Arbi. 1981. *Sistem Politik Indonesia kestabilan Peta Kekuatan Politik dan Pengembangan*. Jakarta: Rajawali Pers.

⁵⁴ Susan Welch dalam Efriza, *Political Marketing "Strategi Memenangkan Pemilu Sebuah Pendekatan Baru Kampanye Pemilihan Umum DPR, DPD, Presiden"*. (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012), h. 534.

politik, dan pemerintah tidak berpengaruh terhadap hidupnya. Faktor sistem politik mengetahui penyebab golput yang dilihat dari sistem politik dan sistem pemilu karena kecewa dengan kebijakan dan implementasi dari pemerintah, pemilih melihat sistem pemilu tidak membawa kepada perubahan kehidupan berbangsa dan bernegara, pemilih merasakan jenuh dengan banyaknya pemilihan yang dilakukan sebelumnya, pemilih kecewa karena tidak mendapat undangan / tidak terdaftar, pemilih kecewa dengan kinerja panitia penyelenggara pemilihan (KPU, PPK, dan PPS), pemilih melihat keberpihakan pemerintah dalam proses pemilihan, dan lain sebagainya.

Faktor kepercayaan politik mengetahui penyebab golput yang melihat dari ketidakpercayaan terhadap saluran politik dalam bentuk kandidat atau partai politik. Lebih jelasnya, faktor ini melihat pemilih yang tidak percaya kepada janji politik, ketidaksukaan kepada pemimpin yang berkuasa saat ini, kandidat kurang berprestasi kandidat tidak dekat dengan masyarakat, kemampuan kandidat kurang memadai, kecewa karena masih maraknya praktik KKN, pemilih kecewa karena pilihannya tidak ikut berkompetisi, dan lain-lain.⁵⁵

Faktor latar belakang status sosial-ekonomi mengetahui penyebab golput yang dilihat dari tingkat pendidikan, tingkat pendapatan, dan tingkat pekerjaan. Penelitian Raymond E. Wolfinger dan Steven J.

⁵⁵ Surbakti, Ramlan. 1984. *Dasar-dasar ilmu politik*. Surabaya: Airlangga University Press.S

Rossenstone menunjukkan pemilih yang tingkat pendidikannya rendah cenderung menunjukkan angka ketidakhadiran dalam pemilu cukup tinggi. Para pemilih yang tingkat pendapatannya rendah cenderung menunjukkan angka ketidakhadiran cukup tinggi dalam pemilu. Pemilih yang memiliki pekerjaan tertentu lebih menghargai partisipasi warga. Para pemilih yang bekerja dilembaga pemerintah cenderung lebih tinggi tingkat kehadirannya dalam pemilu dibandingkan pemilih yang bekerja di lembaga yang tidak mempunyai kaitan dengan kebijakan pemerintah.⁵⁶

e. Penanaman Kesadaran Golput

Perilaku tidak memilih atau golput umumnya dipakai untuk merujuk pada fenomena ketidakhadiran seseorang dalam pemilu karena tidak adanya motivasi. Masyarakat pada beberapa negara berkembang saat ini mewujudkan perilaku golput tidak hanya dengan tidak hadir ketempat pemungutan suara saja. Mereka melakukan hal sebaliknya, dimana mereka tetap datang ketempat pemungutan suara dengan tidak mencoblos kartu suara atau merusak kartu suara. Bentuk perilaku golput ini dilakukan sebagai ekspresi protes terhadap pihak pemerintah, partai politik, dan lembaga-lembaga demokrasi lainnya. Perilaku golput di Indonesia pada umumnya dapat dimanifestasikan ke dalam beberapa bentuk, seperti yang dikemukakan Efriza berikut ini:

⁵⁶ Meclosky, Gelbert. 1994. *Ciri-ciri Partisipasi Politik*. Jakarta: Pustaka Pelajar Offset.

- 1) Orang yang menghadiri TPS sebagai aksiprotes terhadap pelaksanaan pemilu dan sistem politik yang ada.
- 2) Orang yang menghadiri TPS namun tidak menggunakan hak pilihnya secara benar dengan menusuk lebih dari satu gambar.
- 3) Orang yang menggunakan hak pilihnya dengan jalan menusuk bagian putih dari kartu suara. Perilaku ini merupakan refleksi protes atas ketidakpuasan terhadap sistem politik yang sedang berkembang.
- 4) Orang yang tidak hadir di TPS dikarenakan mereka memang tidak terdaftar sehingga tidak memiliki hak suara. Perilaku golput ini disebabkan alasan administratif dan kelompok golput ini disebut golputpasif.⁵⁷

f. Bentuk Kesadaran Golput

Perilaku golput merupakan salah satu fenomena yang menja dibagian dalam pemilihan umum sebagai perwujudan asas demokrasi kenegaraan. Memahami perilaku golput memang tidak sebatas pengamatan semata. Perilaku golput juga susah untuk dijelaskan karena alasan yang berbeda-beda dari pemikiran dan latar belakang setiap pemilih. Muhammad Asfa rmenjelaskannya dalam tulisan “perilaku golput” untuk membantu dalam memahami perilaku bentuk golput, diantaranya:

- a). Pendukung golput yang mengaku akan mengekspresikan perilakunya dengan caratidak menghadiri bilik suara, setidaknya ada empat alasan sebagai argumentasi mereka tidak hadir di bilik suara,yaitu:

⁵⁷ Ibid. h. 535.

- 1). Sebagai aksi protes terhadap pemerintah, anggota DPR, dan parpol.
 - 2). Tidak adanya nilai yang lebih dari proses pemilu yang terjadi.
 - 3). Adanya urusan yang lebih penting seperti disinggung di atas mengenai tidak adanya nilai yang lebih dari proses pemilu.
 - 4). Dikarenakan malas saja karena tidak adanya nilai lebih dari aktivitas politik melalui kehadiran di bilik suara.
- b). Pendukung golput yang beralasan tetap hadir ketempat pemungutan suara meskipun sudah menetapkan tidak memilih, ada beberapa alasan yang melatar belakanginya, yaitu:
- 1). Untuk menghindari sorotan penguruskampung, khususnya Ketua RT.
 - 2). Untuk menghindari perbincangan paratetangga.
 - 3). Sebagai tindak pencegahan atas kecurangan yang mungkin bisa dilakukan panitia pemilihan akibat ketidakhadirannya keTPS.⁵⁸
- c). Pendukung golput yang mengekspresikan perilakunya dengan mencoblos lebih dari satu di data tanda gambar, memasukkan kartu suara kosong atau mencoblos bagian putih dari kertas suara, pertimbangannya sebagai berikut:
- 1). Sebagai aksi protes baik kepada pemerintah, anggota DPR-DPRD, dan parpol.

⁵⁸ Asfar Muhamad, *Pemilu dan Perilaku Memilih*, (surabaya, Pustaka Eureka, 2006), h. 2013.

- 2). Agar kertas suara tidak disalah gunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
- 3). Untuk memberikandorongan dan keberanianpada publik agar beranimenunjukkan sikap protesmereka melalumerusak kertas suara.
- 4). Agar parpol dan kandidat memperhitungkan keberadaan kelompok golput.

B. Tinjauan Pustaka

1. Skripsi Abdul Qadir, 2013. Fakultas ilmu sosial dan Ilmu politik. Universitas Medan Area, “Peranan Partai Politik dalam menanggulangi Golongan Putih (Golput) pada pemilihan legislatif 2009” dalam penelitiannya Abdul Qadir terfokus pada peranan partai politik dalam menanggulangi golongan putih dalam pemilihan legislatif 2009, pengurus partai politik yang ada menjalankan peranannya dengan berusaha sesuai dengan UU Nomor 2 tahun 2008 tentang partai politik.⁵⁹
2. Skripsi yang berjudul Fenomena Golput Dalam Pemilihan Bupati tuban tahun 2006 dalam Perspektif Politik Islam yang disusun oleh Nunuk Handayani Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga. Golput merupakan fenomena yang sering terjadi dalam setiap pemilihan umum hal ini dikarenakan kondisi sosio-ekonomi, pendidikan dan juga KPUD sebagai penyelenggara pilkada yang membuat masyarakat kecewa. Jika kekecewaan tersebut semakin bertambah maka akan

⁵⁹Abdul Qadir, “Peranan Partai Politik dalam menanggulangi Golongan Putih (Golput) pada pemilihan legislatif” 2009, Fakultas ilmu sosial dan Ilmu politik. Universitas Medan Area, 2013.

terjadi apatisme yang melemahkan legitimasi kepemimpinan dan membahayakan kelangsungan pemerintahan. Adapun persamaan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode kualitatif dengan deskriptif analisis. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penulis yaitu penulis mengambil judul tentang Analisis Hukum Islam Mengenai Golput Dalam Pilkada Menurut Perspektif Majelis Ulama Indonesia Lampung yang terfokus kepada bagaimana pandangan MUI Lampung Mengenai Golput dalam Pilkada.⁶⁰



⁶⁰Nunuk Handayani Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga, *"Fenomena Golput Dalam Pemilihan Bupati tahun 2006 dalam Perspektif Politik Islam"*.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Qs. At-Tahrim (66)
Bandung: PT Syamil Cita Media, 1987.

Departemen Agama Qur'an Surat An-Nisa: 59 Penyelenggaraan dan Penerjemah
Al-Qur'an DAN Terjemahnya, Depang RI, 2000

Departemen Agama Qur'an Surat Al-An'am 165 Yayasan Penyelenggara dan
Penterjemah Al-Qur'an dan Terjemahnya, Depang RI, 2000

QR. Surat An-Nisa; 4 :59.

Buku

Bunyana Solihin, *Kaidah Hukum Islam*, (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2016)

Elly M. Setiadi, Usman Kolip, *Pengantar Sosiologi Politik*, (Jakarta: Kencana, 2013)

Iqbal, Muhammad, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014)

Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Sosial* (Bandung : Mandar Maju, 1996)

M. Nasir, *Metode Penelitian* (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1988)

Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2010)

Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2013)

Noetoadmojo, Soekidjo 2003, *Metodologi Penelitian Kesehatan*, (Jakarta: Rineka Cipta)

Sedermati, Syarifudin Hidayat, *Metode Penelitian* (Bandung : Mandar Maju, cet 1, 2002)

Sholeh Ni'am Sholeh, *Golput dalam Pemilihan Umum perspektif Islam*, (Jakarta : MUI, 2007),

Soeratno, Lincoln Arsyad, *Metode Penelitian Untuk Ekonomi dan Bisnis* (Yogyakarta: STIM YKPN, 2008)

- Sudarsono, *Kamus Hukum (Edisi Baru)*, (Jakarta : PT Asdi Mahasatya, 2007),
- Sugiono, *Metode Penelitian bisnis, cetakan ke 14* (Bandung: Alfabeta, 2009),
- Suharsimi, Arikunto, *Prosedur Penelitian Pendekatan Praktik* (Jakarta: RinekaCipta,2006)
- Susiadi, *Metode Penelitian* (Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung ,2015)
- Wardi Bahtiar, *Metode Ilmu Dakwah* , (Jakarta ; Logos cet 1, 1997)
- Kilas Balik 40 Tahun Majelis Ulama Indonesia Provinsi Lampung Berkarya Untuk Umat
- Muhammad Asfar, *Pemilu dan Perilaku Memilih*, (Surabaya, Pustaka Eureka, 2006)
- Susan Welch dalam Efriza, *Political Marketing "Strategi Memenangkan Pemilu Sebuah Pendekatan Baru Kampanye Pemilihan Umum DPR, DPD Presiden"*. (Jakarta: PT. GramediaPustakaUtama, 2012)
- Arbi Sanit, *Sistem Politik Indonesia, Kestabilan dan Perkembangan Politik*, (Jakarta: Grasindo, 1992)
- Arbi Sanit, *Sistem Politik Indonesia, Kestabilan dan Peta Kekuatan Politik*, (Jakarta: Grasindo, 1992), h.190.
- Arief Budiman dalam Joko Prihatmoko, *Pemilihan Kepala Daerah Langsung*, (Jogjakarta: Pustaka Pelajar, 2003),
- PahmiSy, *Politik Pencitraan*, (Jakarta:GaungPersadaPress, 2010),
- Joko Prihatmoko, *Pemilihan Kepala Daerah Langsung*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2003)
- Irham Fauzi, *Permasalahan Yang Timbul pada Pilkada*, (Yogyakarta: Paperpresentat Jurusan Teknik Informatika STMIKA mikom Yogyakarta, 2011)
- Septi Nur Wijayanti-Iwan Satriawan, *Hukum Tata Negara*, (Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2013),
- Tjahjo Kumolo, *Politik Hukum Pilkada Serentak*,(Jakarta: Expose, 2015),
- Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta Prima Grafika, 2013)

- Ramlan Surbakti, *Sistem Pemilu dan Tataanan Politik Demokrasi*, dalam Ramlan Surbakti, dkk (Ed.), *Perekayasaan Sistem Pemilu untuk Pembangunan Tata Politik Demokratis*, (Jakarta: Kemitraan Jakarta, 2008)
- Rozali Abdullah. *Mewujudkan Pemilu yang Lebih Berkualitas (Pemilu Legislatif)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009)
- Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010)
- Abdul Wahab Khallaf, *“Kaidah-kaidah Hukum Islam Ilmu Ushul Fiqh”*
- Budiardjo, Mariam. *“Demokrasi di pakistan”*, *Kompas*, 11 dan 12 Agustus 1996
- Al Rasjid, Harun. *Beberapa Pandangan Mengenai Undang-Undang Pemilihan Umum 1969*. Djakarta: Pelita Ilmu, 1970.
- Isjwara, F. *Pengantar Ilmu Politik*. Bandung: Dhiwantara. 1964
- Friedrich, Carl J. *Constitutional Government and Democracy: Theory and Practice in europa and America*. Waltham, Mass: Blaisdell Publishing Company, 1967.
- Untrecht, E. *Pengantar dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Ichtiar, 1966.
- Heller, Herman. “political Science”. *Encyclopaedia of the Social Sciences*. New york: The MacMillan Co, 1959, Djilid XII.
- Sanit, Arbi. 1981. *Sistem Politik Indonesia kestabilan Peta Kekuatan Politik dan Pengembangan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Surbakti, Ramlan. 1984. *Dasar-dasar ilmu politik*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Meclosky, Gelbert. 1994. *Ciri-ciri Partisipasi Politik*. Jakarta: Pustaka Pelajar Offeset.
- Asfar Muhamad, *Pemilu dan Perilaku Memilih*, (surabaya, Pustaka Eureka, 2006)
- Abdul Qadir, “Peranan Partai Politik dalam menanggulangi Golongan Putih (Golput) pada pemilihan legislatif 2009, Fakultas ilmu sosial dan Ilmu politik. Universitas Medan Area, 2013.
- Nunuk Handayani Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga, “Fenomena Golput Dalam Pemilihan Bupati tuban tahun 2006 dalam Perspektif Politik Islam”.
- Kilas Balik 40 Tahun Majelis Ulama Indonesia Provinsi Lampung Berkarya Untuk Umat

Bahrul Ulum, “ *Ulama dan Politik Nalar Politik Kebangsaan Majelis Ulama Indonesia*”

Harahap, M. Yahya. 1998 *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Sinar Grafika. Jakarta.

Abdussalam, H. R. 2009. *Hukum Kepolisian Sebagai Hukum positif dalam Disiplin Hukum*. Restu Agung, Jakarta.

Lamintang, P.A.F. 1996. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.

Pamungkas, Sigit. 2010. *Pemilu, Perilaku Pemilih, dan Kepartaian*. Instit For Democracy and Walfarism. Yogyakarta.

Sanit, Arbi. 1992. *Aneka Pandangan Fenomena Golput*. Pustaka Sinar Harapan. Jakarta.

Jurnal

Agus Hadiawan, *Evaluasi Pemilihan Kepala Daerah Langsung di Provinsi Lampung (Studi Kabupaten Lampung Selatan, Kota Metro dan Kota Bandar Lampung)*, Bandar Lampung, Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pembangunan Universitas Lampung, Vol 3, No7 Juli-Desember 2009

Wawancara

Drs. H. Rosidi SH selaku Komisi Dakwah dan Pengembangan masyarakat MUI Lampung, wawancara di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Tanggal 28 November 2019, Pukul 13.15 WIB.

Drs. KH. Basyaruddin Maisir AM selaku Sekretaris Umum MUI Provinsi Lampung, wawancara di Pondok Pesantren Al-Hikmah Bandar Lampung, Tanggal 28 November 2019, Pukul 11.20 WIB

Dr. H. Khairudin Thahmid, M.H selaku Ketua MUI Lampung, wawancara di Universitas Islam Negri Raden Intan Lampung, Tanggal 9 Desember 2019, Pukul 08.33 WIB.

H. Suryani M. Nur, S.Sos., MM. selaku Wakil Ketua MUI Lampung, wawancara di Universitas Tulang Bawang Bandar Lampung, Tanggal 28 November 2019, Pukul 10.56 WIB.

Sumber on-line

Wikipedia, “Majelis Ulama Indonesia” (*On-line*), tersedia di : <https://www.mui.or.id> (6 Oktober 2019,15:30),

Selvian Nuriah, “Golput” (*On-line*), tersedia di: blogspot.com (6 Oktober 2019, 15:10), dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Muchlisin Riadi, “*Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA)*” (*On-line*), tersedia di : <https://www.kajianpustaka.com> (6 Oktober 2019,14:20), dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

